

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran KPU Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan program Kirab Pemilu 2024, dapat disimpulkan bahwa Kirab Pemilu menjadi strategi komunikasi politik yang efektif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal. Pelaksanaan Kirab Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor mencerminkan suatu bentuk inovasi strategis dalam penyelenggaraan pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi politik masyarakat. Kegiatan ini bukan hanya seremonial pengiring pesta demokrasi, melainkan telah berkembang menjadi instrumen pendidikan politik berbasis komunitas yang mampu menjangkau berbagai segmen sosial secara langsung dan partisipatif. Kirab Pemilu tidak hanya berperan sebagai media sosialisasi tahapan pemilu, tetapi juga sebagai upaya menyampaikan pesan-pesan demokrasi dengan pendekatan budaya dan komunikasi langsung yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Kirab Pemilu 2024 memperlihatkan dinamika sosial-politik yang kompleks, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor, keragaman penduduk, serta tantangan struktural yang dihadapi.

Kirab Pemilu 2024 telah berhasil menyentuh aspek kultural dan emosional masyarakat, terutama melalui kegiatan arak-arakan bendera partai politik, pentas budaya, serta pelibatan komunitas lokal dalam agenda edukatif seperti sosialisasi pemilih pemula, pelatihan kepemiluan, dan panggung seni demokrasi. Melalui rangkaian kegiatan yang dikemas secara atraktif, KPU Kabupaten Bogor berhasil menjadikan pemilu sebagai peristiwa yang lebih dekat dan relevan bagi masyarakat. Penerapan pendekatan segmentasi wilayah, berdasarkan karakteristik sosial seperti pemilih pemula, komunitas pesantren, pedagang pasar, hingga komunitas motor, menunjukkan bahwa KPU memiliki pemahaman mendalam terhadap keragaman masyarakat Bogor.

Kirab Pemilu 2024 secara nyata memberikan pengaruh terhadap peningkatan partisipasi pemilih, yang terlihat dari data perbandingan Pemilu 2019 dan 2024 di sejumlah kecamatan yang dijangkau oleh kirab. Wilayah-wilayah yang menjadi titik kirab menunjukkan peningkatan partisipasi rata-rata sebesar 5-8%, sedangkan wilayah yang tidak dijangkau hanya mengalami kenaikan sebesar 1-2%. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan langsung, kultural, dan dialogis yang dilakukan dalam Kirab Pemilu berkontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran politik warga, terutama kelompok yang sebelumnya tergolong apatis.

Namun di balik capaian tersebut, terdapat sejumlah hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Bogor, baik dari segi teknis, logistik, sosial maupun politis. Salah satu hambatan utama yang sangat memengaruhi kualitas dan keberhasilan kegiatan adalah faktor cuaca, terutama hujan deras yang turun secara tak terduga di berbagai wilayah. Sebagai daerah yang dikenal dengan curah hujan tinggi, Kabupaten Bogor mengalami kendala lapangan yang menyebabkan penundaan, pengalihan lokasi, hingga pembatalan beberapa rangkaian kegiatan. Hal ini secara langsung menurunkan daya tarik visual dan atmosfer semarak dari kegiatan kirab yang dirancang untuk meriah dan interaktif. Cuaca hujan tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga memengaruhi psikologi peserta, relawan, serta masyarakat umum.

Dalam beberapa titik, keterbatasan infrastruktur drainase dan lokasi terbuka membuat alat peraga rusak, panggung tergenang air, serta kerumunan masyarakat enggan bertahan. Hal ini berdampak pada turunnya jumlah partisipasi serta persepsi publik terhadap efektivitas kegiatan. Cuaca buruk juga mengganggu mobilisasi alat dan personel, serta menimbulkan beban logistik dan biaya tambahan yang tidak sedikit. KPU Kabupaten Bogor harus bekerja ekstra keras melakukan adaptasi mendadak, seperti pemindahan lokasi ke ruang tertutup, penyusunan ulang jadwal, dan perubahan metode komunikasi dari fisik ke digital.

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan logistik. Mengelola kirab yang menjangkau puluhan kecamatan membutuhkan tim teknis yang kuat, jaringan relawan, serta koordinasi intensif dengan berbagai pihak. Namun, pada praktiknya, tim KPU dibebani pekerjaan

administratif lainnya menjelang Pemilu sehingga terjadi kelelahan, konsentrasi terpecah, dan efektivitas kerja menurun. Dukungan dari instansi mitra, seperti pemerintah daerah atau dinas kebudayaan, juga tidak selalu berjalan optimal, baik karena kendala komunikasi maupun perbedaan persepsi terhadap urgensi kirab.

Dari sisi sosial-politik, pelaksanaan kirab juga menghadapi tantangan dalam bentuk resistensi dan kecurigaan sebagian masyarakat yang memandang kegiatan tersebut sebagai upaya terselubung yang berpihak pada partai politik tertentu. Meskipun KPU menegaskan netralitasnya, kehadiran simbol-simbol partai seperti bendera dan logo bisa menimbulkan persepsi partisan jika tidak dikemas secara proporsional. Ini menjadi pelajaran penting bahwa edukasi mengenai fungsi kirab harus dilakukan jauh sebelum kegiatan dimulai, agar masyarakat memahami bahwa kirab adalah bagian dari sosialisasi dan pendidikan politik, bukan kampanye.

5.2 SARAN

Berdasarkan berbagai hambatan, tantangan, serta evaluasi capaian dari pelaksanaan Kirab Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang bersifat praktis dan teoritis, agar pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

5.2.1 SARAN PRAKTIS

1. KPU Kabupaten Bogor perlu menyusun perencanaan antisipatif terhadap cuaca buruk, mengingat Kabupaten Bogor memiliki intensitas curah hujan tinggi sepanjang tahun, sehingga perlu menetapkan dua skenario pelaksanaan outdoor dan indoor yang fleksibel dan siap dijalankan kapan saja, serta penyediaan tenda besar, perlengkapan kedap air, sistem pengeras suara portabel, dan jadwal cadangan menjadi kebutuhan dasar yang harus dianggarkan sejak awal.
2. Mengingat luas wilayah dan jumlah titik kegiatan yang besar, disarankan agar melakukan peningkatan kapasitas sumber daya

manusia (SDM) dengan sistem pelatihan yang berkelanjutan dan pembentukan tim lapangan yang dibagi secara strategis per wilayah, serta melibatkan mahasiswa, komunitas pemuda, dan aktivis lokal untuk membantu dalam mendistribusikan beban kerja serta memperluas jaringan pelaksanaan.

3. KPU Kabupaten Bogor perlu melakukan penguatan koordinasi logistik dan transportasi dengan instansi lokal, baik kepolisian, Dinas Perhubungan, maupun relawan lokal untuk menjamin kelancaran rute dan distribusi alat. Rute yang ditentukan harus memperhitungkan kondisi jalan, cuaca, dan ketersediaan fasilitas publik di lokasi.
4. Meskipun kegiatan kirab bersifat langsung, KPU Kabupaten Bogor harus melakukan penggunaan media sosial sebagai pelengkap tetap harus dioptimalkan, misalnya dengan menyiarkan kegiatan secara langsung (*live streaming*), membuat lomba video pendek di TikTok atau Instagram, serta menghadirkan figur-figur lokal populer sebagai duta kirab. Pendekatan ini juga akan menarik perhatian generasi muda yang cenderung aktif di ruang digital.
5. KPU Kabupaten Bogor perlu menjadikan kirab sebagai bagian dari program pendidikan politik jangka panjang, bukan sekadar agenda menjelang pemilu. Kirab bisa menjadi titik awal pembentukan komunitas demokrasi desa, forum warga sadar pemilu, atau ruang ekspresi politik bagi kelompok rentan yang selama ini kurang tersentuh.
6. Kirab Pemilu selanjutnya harus menyusun materi sosialisasi yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di tiap wilayah. Misalnya, pendekatan ke masyarakat petani bisa lebih menekankan pada pentingnya memilih pemimpin yang berpihak pada sektor agraria, sementara kepada pemuda dapat lebih menyoroiti isu digitalisasi dan lapangan kerja.

5.2.2 SARAN TEORITIS

2. Penelitian ini hanya berfokus pada satu program KPU Kabupaten Bogor dalam strategi meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bogor, yaitu kirab pemilu 2024 yang disarankan kepada pembaca untuk membaca dan memahami kegiatan kirab pemilu lebih kritis untuk melihat bahwa demokrasi tidak hanya tumbuh di ruang legislatif atau eksekutif, tetapi juga di jalan-jalan desa, panggung rakyat, dan perbincangan sederhana di tengah masyarakat.
3. Penelitian ini mendorong kajian akademis untuk lebih kritis dalam melihat kirab pemilu sebagai upaya yang efektif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal, sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan awal untuk mengembangkan studi-studi berikutnya terkait kirab pemilu dan bentuk partisipasi politik non-elektoral lainnya.